

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah sebagai pengelola utama dari tatanan kehidupan bernegara mempunyai peran penting dalam mengayomi wilayahnya masing-masing, salah satunya adalah dengan pelimpahan wewenang dan kekuasaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam upaya mengatur segala kepentingan daerahnya sendiri. Kebijakan ini disebut juga sebagai desentralisasi fiskal atau otonomi daerah yang telah ditetapkan sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan UU No.23 Tahun 2014. Sebagai wujud dari implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerahnya sendiri dengan melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan pemberian otonomi melalui desentralisasi fiskal tersebut memiliki tiga misi utama yaitu dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah, memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik (Barzelay, 1991).

Pengukuran tingkat keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, diperlukan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah yang terstruktur agar terwujudnya pemerintahan yang baik dan tertata (*good governance*). Reformasi pengelolaan sumber pendapatan dan manajemen pengelolaan daerah sangat dibutuhkan dalam menunjang pemerintahan yang baik serta memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang sesuai. Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat menggambarkan ukuran ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintahan pusat dari segi pengelolaan keuangan dan pembiayaan (Haryanto, 2018).

Peran pemerintah dalam kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dari bagaimana pengelolaan pemerintah dalam pengelolaan sumber keuangan daerah. Salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah yaitu Pendapatan Asli

Daerah (PAD) termasuk kepada pajak daerah dan retribusi daerah. Pada tahun 2018, dalam rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat, Pajak Daerah menjadi kontributor utama dengan persentase sebesar 79% dari total PAD. Kemudian disusul dengan kontribusi dari penerimaan retribusi daerah sebesar 20% dari total PAD. Hal ini membuktikan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah sangat menunjang perekonomian di Sumatera Barat.

Berdasarkan teori ekonomi mengenai faktor-faktor ekonomi, pajak dan retribusi daerah yang berasal dari sektor perekonomian termasuk ke dalam akumulasi modal. Jika penerimaan yang dihasilkan dari pajak dan retribusi meningkat maka output terhadap barang dan jasa yang dihasilkan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan meningkat pula. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak dan retribusi akan digunakan kembali sebagai modal untuk berproduksi. Penerimaan pajak dan retribusi daerah umumnya dipungut dari sektor jasa seperti Pajak Hotel dan Restoran yang menyumbang sekitar 54% dari total pajak daerah Sumatera Barat di tahun 2018. Sementara untuk retribusi daerah yang dipungut dari sektor jasa yaitu Retribusi Parkir, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Penginapan (Hotel), dan Retribusi Pelayanan Jasa lainnya.

Pertumbuhan sektor perekonomian yang pesat akan meningkatkan pendapatan daerah dari segi produktivitas barang dan jasa. Hal ini dicontohkan ketika kegiatan perekonomian daerah meningkat maka akan berdampak terhadap banyaknya tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, konsumsi masyarakat akan meningkat dan kegiatan produktif akan didorong dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Selain itu, pendapatan daerah seperti dana perimbangan dan transfer dari pemerintah daerah akan menjadi reduksi peranan yang akan dirasakan pemerintah daerah melalui APBD (Kusuma, 2016). Namun, pada kenyataannya dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, pendapatan daerah dari pemerintah pusat masih lebih tinggi dan dominan dibandingkan dengan total pendapatan asli daerah. Hal ini mengakibatkan ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah sehingga pelaksanaan otonomi daerah belum berjalan optimal dan pengelolaan keuangan daerah masih kurang. Selain itu permasalahan belanja pemerintah daerah banyak

digunakan untuk pembiayaan yang bukan merupakan hal yang fundamental maupun kurang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga pengalokasiannya sering tidak tepat sasaran dan tidak terjadinya efisiensi alokasi sumber daya.

Berdasarkan laporan DPRD Sumatera Barat pada tahun 2018 menyatakan bahwa realisasi pengelolaan dan penggunaan APBD di tahun 2018 sudah berjalan cukup baik dan optimal sebesar Rp 6,29 triliun, namun untuk realisasi belanja daerah disimpulkan masih belum optimal dengan terealisasi hanya sebesar Rp 6,26 triliun dan memiliki sisa alokasi anggaran (slipa) sebesar Rp 628 miliar (Hendra, 2018).

**Tabel 1. 1 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2019-2021**

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	Rata-rata
Kab. Limapuluh Kota	3.58 %	3.98 %	4.40 %	3,99 %
Kab. Agam	4.73 %	4.95 %	4.74 %	4,81 %
Kab. Kepulauan Mentawai	3.41 %	2.23 %	2.39 %	2,68 %
Kab. Padang Pariaman	4.53 %	4.33 %	5.63 %	4,83 %
Kab. Pasaman	3.66 %	3.79 %	3.94 %	3,80 %
Kab. Pesisir Selatan	6.13 %	6.19 %	6.25 %	6,19 %
Kab. Sijunjung	2.99 %	3.21 %	3.75 %	3,32 %
Kab. Solok	2.88 %	2.98 %	3.64 %	3,17 %
Kab. Tanah Datar	5.87 %	6.53 %	5.59 %	6,00 %
Kota Bukit Tinggi	4.68 %	5.99 %	5.75 %	5,47 %
Kota Padang Panjang	3.81 %	3.86 %	3.91 %	3,86 %
Kota Padang	33.09 %	34.88 %	38.13 %	35,37 %
Kota Payakumbuh	5.00 %	4.83 %	4.62 %	4,82 %
Kota Sawahlunto	2.26 %	2.44 %	2.72 %	2,47 %
Kota Solok	1.96 %	1.82 %	1.75 %	1,84 %
Kota Pariaman	1.44 %	2.33 %	1.95 %	1,91 %
Kab. Pasaman Barat	4.64 %	5.65 %	4.89 %	5,06 %
Kab. Dharmasraya	3.62 %	4.14 %	3.60 %	3,79 %
Kab. Solok Selatan	2.81 %	2.80 %	3.22 %	2,94 %

(DJPK, diolah penulis, 2023)

Berdasarkan data yang dihitung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Sumatera Barat melalui sumber Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, didapatkan bahwa Kota Padang berkontribusi paling tinggi sebesar 35,37% dan Kota Solok memberikan berkontribusi cukup rendah terhadap Provinsi Sumatera Barat dengan rata-rata 1,84%. Penyebab perbedaan signifikan antar daerah disebabkan oleh beberapa hal seperti sektor perekonomian unggulan masing-masing daerah, jumlah penduduk dan luas tanah, pengeluaran pemerintah terhadap belanja modal dan investasi daerah. Maka dari itu setiap daerah menjadi berbeda-beda dan tidak bisa dibandingkan hanya dari kontribusi setiap daerah. Selain itu, tingkat pendapatan daerah yang tinggi dapat dipengaruhi dari besarnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Profit yang dihasilkan perusahaan di dalam daerah tersebut akan bertambah tinggi dan mendorong lebih banyak investasi yang dilakukan masyarakat (Sukirno, 2004).

Pendapatan daerah dipengaruhi oleh kinerja ekonomi, salah satunya dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan PDRB yang lebih besar berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan derajat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) dari berbagai pungutan seperti pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, PDRB menjadi hal penting sebagai ukuran perekonomian daerah dan kemampuan masyarakat dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. Artinya PDRB digunakan dalam memahami potensi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil analisis oleh Yanti (2013) mengenai perkembangan PAD dalam pengelolaan keuangan di Kota Padang memperlihatkan hasil sebagai berikut, untuk desentralisasi fiskal, rasio derajat rata-rata hanya 15,60%. Artinya derajat otonomi dan kemampuan keuangan Kota Padang dalam menjalankan otonominya masih rendah. Berdasarkan rata-rata kurs IKR hanya sebesar 14,77%, hal ini berarti PAD mempunyai sedikit kemampuan atau potensi untuk menutupi pengeluaran sehari-hari



mereka. Dengan kata lain, kemampuan Kota Padang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, pembangunan daerah serta pelayanan bidang sosial perkotaan relatif tergolong rendah dari segi finansial daerah, meskipun meningkat dan menurun setiap tahun.

Terdapat banyaknya faktor yang menyebabkan perbedaan atau adanya ketimpangan pendapatan daerah yang akan berdampak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah seperti dari sektor perekonomian unggulan daerah, pertumbuhan investasi daerah yang akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, serta jumlah penduduk usia produktif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan sebagai analisis untuk mengetahui pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam menunjang kemandirian keuangan daerah sesuai dengan variabel seperti sektor jasa, investasi daerah dan tingkat partisipasi Angkatan kerja.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera barat?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Menjabarkan pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
2. Menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera barat.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat dalam memperluas pengetahuan berdasarkan fakta-fakta yang sesuai dengan teori mengacu kepada penelitian sebelumnya dan banyaknya kajian literatur mengenai analisis pengelolaan sumber-sumber keuangan pemerintah dengan beberapa variabel. Penelitian ini menggunakan metode yang

sesuai dengan judul dari penelitian agar menghasilkan hasil yang kredibel, aktual, dan terpercaya bagi para pembacanya antara lain:

A) Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah setempat atau pemerintah pusat dan digunakan sebagai acuan dalam menambah informasi terhadap arah kebijakan yang akan dilakukan pemerintah terkait pengelolaan keuangan, terkhusus terkait peningkatan pengelolaan keuangan dalam hal penerimaan daerah dan peningkatan struktur perekonomian daerah dari berbagai sektor perekonomian.

B) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan dan bahan acuan terkait penelitian serupa mengenai analisis pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

C) Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini merupakan salah satu sumber yang dapat digunakan untuk menambah wawasan dan bidang keilmuan serta mengasah kemampuan analisis untuk menjawab permasalahan ekonomi daerah tentang kemandirian keuangan daerah. Diharapkan kajian yang dilakukan ini dapat menambah penelitian teoritis terkait kemandirian keuangan daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

